

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA PENJARA
DI PENGADILAN NEGERI BANTAENG
DALAM KASUS PEMBUNUHAN**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.Hi) pada Program Studi Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Oleh

AHMAD NASRUN
NIM. 10300108008

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nasrun
NIM : 10300108008
Tempat/Tgl Lahir : Bantaeng, 23 April 1989
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ HPK
Angkatan : 2008
Alamat: Bantaeng
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana
Penjara di Pengadilan Negeri Bantaeng dalam Kasus
Pembunuhan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh keasadaran menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi ini beserta gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Samata-Gowa, 24 Agustus 2012 M

Peyusun

Ahmad Nasrun
NIM: 10300108008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara di Pengadilan Negeri Bantaeng dalam Kasus Pembunuhan” yang disusun oleh **Ahmad Nasrun**, NIM: 10300108008, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1434 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, dengan beberapa perbaikan.

Samata – Gowa, 11 Maret 2013 M
28 R.Akhir 1434 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA.	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Prof. DR. H. Minhajuddin, MA.	(.....)
Munaqisy I	: DR. Muammar Muhammad Bakry Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dra. Rahmatiah., HL. M.Pd	(.....)

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Alauddin Makassar

Prof. Dr. Ali Parman, M.A
NIP: 19570414 198603 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Za	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah		-
ي	Ya'	Y	Apostrof

DAFTAR SINGKATAN



Bapas	: Badan Pemasyarakatan
Dg.	: Daeng
HAM	: Hak Asasi Manusia
HPK	: Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Jo.	: Juncto
Kab.	: Kabupaten
KHA	: Konvensi Hak Anak
KUHAP	: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
MP	: Masa Percobaan
NIM	: Nomor Induk Mahasiswa
No.	: Nomor
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PN	: Pengadilan Negeri
QS	: Quran Surah
RI	: Republik Indonesia
swt.	: Subhanahu wa ta'ala
saw.	: Sallallahu Alaihi Wasallam
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

ABSTRAK

NAMA : AHMAD NASRUN
NIM : 10300108008
JURUSAN : HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI
PIDANA PENJARA DI PENGADILAN NEGERI
BANTAENG DALAM KASUS PEMBUNUHAN**

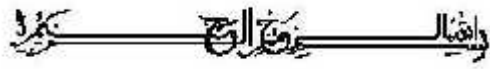
Skripsi ini membahas tentang hukum pidana materil pada fakta perbuatan pelaku tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana No. 124/Pid. B/2010/PN. Btg, dan penerapan sanksi pidana pembunuhan dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam serta upaya-upaya dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan.

Penelitian dilaksanakan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dilaksanakan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu dilakukan pula penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung pada objek-objek atau sumber data, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh beberapa hal yaitu : bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Pidana No : 124/Pid.B/2010/PN.Btg. telah menerapkan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas fakta perbuatan terdakwa Salahuddin alias Sala Bin Rahmani yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Syamsuddin alias Ust.Sudding Bin Raja. Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dihadapkan di muka persidangan dan dinyatakan sebagaimana dalam surat dakwaan dan berdasarkan identitasnya adalah Salahuddin alias Sala Bin Rahmani. Tindakan terdakwa Salahuddin alias Sala' Bin Rahmani yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan terlebih dahulu merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Syamsuddin Bin Raja sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, melakukan pembunuhan berencana.

Berangkat dari uraian tersebut, maka penting bagi para penegak hukum untuk memperhatikan faktor/ penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan sebagai upaya preventif terjadinya the first crime, dan agar lebih tegas dalam menyikapi tindak pidana pembunuhan serta lebih intensif melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat sebagai bentuk upaya refresif dalam menannggulangi/ meminimalisir angka terjadinya tindak pidana.

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang patut diucapkan selain puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang masih sederhana. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa apa yang tertuang dalam skripsi ini sesungguhnya masih jauh dari kesempurnaan baik dalam susunan kalimat maupun bobot keilmuan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Terwujudnya karya tulis ini berkat adanya bantuan dan sumbangsih dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Olehnya itu, sepatutnyalah berterima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Ayahanda tercinta Kaimuddin dan Ibunda tercinta Zahriyah serta adik-adikku dan Adinda tercinta Hj. Irmawati Rahmat, S.Pd yang telah memberikan perhatian, motivasi dan pengorbanan serta doanya demi kesuksesan. Selain itu, tak lupa pula terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. A.Qadir Gassing HT.MS, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Parman. M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Drs. Hamzah Hasan, S.Hi, M.Hi dan Ibu Nila Sastrawati, S.Sos, M.Si.
, selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.
4. Bapak Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag dan Ibu Dra. Rahmatiah, HL. M.Pd masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang secara khusus telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar, atas segala bimbingan yang diberikan selama perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara-saudara antara lain: Andi Irfan, Muhammad Sakri, Hairil Anwar, Hasnia, Feby Ardiansyah, Aminullah, Abdusshiddiq, Aldi Saputra, Marzuki, Ridwan Burak, Abd. Wahab Suwakil, Nia Rahmania, M. Idrus, Ince' abd. Wahid, Salma, Suriani, Nur Haeni Eja, Rati, Anti, Hj. Mila, Nur Lina, Nur Fadillah, Ilmi, Ervin, Evayanti, Fatma, Misbah, Aswar, Ahmad Muhajir Ali, Asfa Arsy, Zulfan, Ibrahim Limpo, Jerky, Nur Abdullah, Rahma, Yaya', Helmilawati, Ifa, Hera, Marni, Furqon, Mita, Erni, Yasin, Umar, Taufiq ihsan, Saharuddin, Mustakim Mahmud, serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan motivasi serta kebersamaannya selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah.
7. Untuk kakanda Muh. Nasrun Jamal serta saudara-saudara yang bergabung dalam organisasi perjuangan Forum Mahasiswa Butta Toa Bantaeng (FMBT), Gerakan Mahasiswa Pemuda Sulawesi-Selatan (GMPSS/GMP SUL-SEL)

serta seluruh DPD GMPSS/GMP SUL-SEL, BADKORSEL, BADKORTIM dan BADKORUT GMPSS/GMP SUL-SEL, HMI, PMII, IMM, KAMMI, LMND, GMKI, PMKRI dan lain-lain yang tak sempat disebutkan satu persatu terima kasih atas keikhlasan membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya kepada Allah swt. segalanya diserahkan sembari bersujud dan memohon doa semoga segala bantuan yang diberikan dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Amin.

Samata-Gowa, 24 Agustus 2012 M
05 Syawal 1433 H

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Ahmad Nasrun
NIM :10300108008

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
DAFTAR SINGKATAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
Bab I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Garis Besar Isi Skripsi.....	8
Bab II TINJAUAN PUSTAKA	11-22
A. Problematika Penerapan Pidana Penjara.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	13
2. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan.....	13
3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan.....	15
B. Upaya Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan	17
1. Metode untuk Mencegah <i>The First Crime (Upaya Preventif)</i>	17
2. Metode untuk Mengurangi Pengulangan Kejahatan (<i>Upaya Represif</i>).....	17
Bab III METODOLOGI PENELITIAN	23-29
A. Lokasi Penelitian	23
B. Jenis Penelitian.....	23
C. Pendekatan Penelitian	23
D. Pengumpulan Data	24
1. Jenis Data	24
2. Sumber Data	25

3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Instrumen Pengumpulan Data.....	27
5. Prosedur Pengumpulan Data.....	27
E. Pengolahan dan Analisis Data.....	28
1. Pengolahan Data	28
2. Analisis Data	28
Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30-66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Letak Pengadilan Negeri Kab. Bantaeng.....	30
2. Sarana dan Prasarana Gedung.....	31
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Bantaeng.....	31
4. Daftar Perkara Pidana Pembunuhan Tahun 2010-2012.....	31
B. Putusan No. 124/Pid.B/2010/PN.Btg.....	32
1. Kasus Posisi.....	32
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	35
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	46
4. Amar putusan Majelis Hakim.....	60
C. Analisis Hukum.....	61
D. Penerapan Sanksi Pidana atau Uqubah terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Pandangan Hukum islam.....	62
1. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Sengaja.....	62
2. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Semi Sengaja.....	63
3. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Tidak sengaja.....	64
Bab V PENUTUP	67-67
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68-70
LAMPIRAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, damai, tenteram dan terkendali serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Penegakan hukum tidak dapat diberlakukan secara kaku kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam perundang-undangan. Pandangan yang sempit dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi jika melanggar aturan-aturan dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jalan keluar untuk mengatasi segala bentuk kejahatan-kejahatan itu diserahkan kepada petugas penegak hukum untuk menguji setiap perkara yang masuk ke dalam proses yang selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan, dengan harapan bahwa para penegak hukum betul-betul mampu menegakkan kebenaran, kejujuran serta keadilan. Hal tersebut diangkat dengan pertimbangan bahwa Indonesia adalah

negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum.¹

Hukum pidana memberikan sanksi yang kejam dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, mengingat sifat keras hukum pidana tersebut, maka kebijaksanaan dalam halnya memutuskan suatu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetap atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan (*Diskresi*)² yang dimiliki polisi justru akan menjadi permasalahan baru apabila polisi mengambil tindakan sebaliknya (tidak menegakkan hukum) tetapi justru memaafkan, mengenyampingkan, menghentikan atau mengambil tindakan lain di luar proses yang telah ditentukan.

Secara konsepsional, makna yang tersirat dibalik penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³

Penegakan hukum/ penerapan sanksi pidana melalui sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dengan memprosesnya sesuai dengan prosedur yang berlaku pada peradilan yang ada.

Sistem peradilan merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,

¹ Rizal Khadafi, *UUD 1945* (Jakarta Selatan: Bukune, 2010), h. 3

² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 91

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 91

menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas karena yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya serta menjadi contoh bagi masyarakat secara umum agar tidak lagi melakukan kejahatan yang sama ataupun kejahatan yang lain.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, terdapat dua (2) model pandangan teori:

Pertama, semata-mata mempertahankan segi normatif hukum pidana. Setiap sistem normatif mempengaruhi, mendorong atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan, sistem peradilan yang berbentuk sistem hukum menggunakan kekuasaan Negara untuk menjalankan aturan secara paksa. Oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan berbagai golongan penduduk, yang oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan perantaraan hukum untuk mendorong atau memaksakan tingkah laku yang diinginkan oleh seperangkat pemegang peran. Dalam kenyataannya jenis tuntutan yang demikian ini disebut sebagai pelaksanaan kekuasaan negara, karena pemegang peran tidak perlu berkeinginan untuk bertindak demikian. Jadi dengan sistem hukum, sebagian masyarakat menggunakan kekuasaan negara untuk memaksa golongan lain dari penduduk sehingga sistem hukum merupakan sistem negara dalam melaksanakan kekuasaan negara.⁴

Mempertahankan segi hukum normatif dilihat dari pendapat tersebut diatas maka hukum terkesan kaku karena arah dan tujuannya dipaksakan seperti yang tercantum di dalam bunyi perundang-undangan tersebut. Para penegak hukum

⁴ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Study Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Alumni, 1985), h. 49

bertugas menjalankan aturan hukum semata, sehingga akibat dari pelaksanaan hukum itu bagi yang diproses tidak dipedulikan. Akibat yang ditimbulkan adalah masyarakat hidup dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum.

Kedua adalah model *sosiologis*, model ini merupakan kebalikan dari model normatif, artinya keadaan yang terjadi pada masyarakat juga menjadi pertimbangan di dalam menegakkan hukum.

Pada model ini, hukum tidak hanya merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat, tetapi meliputi pula lembaga institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah dan asas-asas itu dalam kenyataan, sehingga sepanjang cara-cara yang ada pada masyarakat masih dapat digunakan, maka penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan sebaliknya tidak perlu digunakan terlebih dahulu, akan tetapi penggunaan *non* hukum pidana lebih diutamakan.

Dikaitkan dengan judul tulisan ini yaitu “Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara di Pengadilan Negeri Bantaeng dalam Kasus Pembunuhan”, maka terlihat fokus permasalahan yang akan diajukan, yaitu sejauh mana jangkauan penerapan pidana penjara pada sistem peradilan pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan pembunuhan baik dilihat dari segi *normatif* maupun dari segi *sosiologis*.

Dengan demikian, bahwa dalam rangka penegakan hukum pidana, maka para penegak hukum dapat menggunakan wewenangnya melalui jalur *normatif* dan *sosiologis*. Namun, jalur yang ditempuh hendaknya seimbang bukan terpisah-pisah seolah-olah sebagai lawan yang berbeda dan tidak berhubungan. Bagi para

penegak hukum, kedua model tersebut harus dapat dipertimbangkan sekaligus sebelum mengambil keputusan. Sekalipun pada akhirnya model normatif lebih mendominasi model sosiologis ataupun sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan dan rumusan masalah. Hal ini sangat penting agar dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data tidak terjadi kekaburan dan menyimpang dari tujuan. Adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pembunuhan dalam tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam?
3. Bagaimana efektifitas penerapan pidana penjara di Pengadilan Negeri Bantaeng?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud judul, maka diperlukan pengertian dari beberapa variabel yang dianggap penting dari judul tersebut. Berikut ini, pengertian beberapa variabel yang digunakan:

Tinjauan *yuridis* merupakan proses menganalisis suatu masalah berdasarkan prinsip-prinsip utama hukum tanpa memperhatikan aspek historis maupun aspek etisnya.⁵

Pidana merupakan tindakan hukum/ imbalan hukuman bagi suatu perilaku dalam masyarakat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana atau suatu rangsangan untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana.⁶

Pembunuhan, adalah suatu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁷

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tinjauan normatif dan sosiologis penerapan pidana penjara pembunuhan di Pengadilan Negeri Bantaeng.
- b. Untuk mengetahui Sejauh manakah penerapan pidana penjara di Pengadilan Negeri Bantaeng sebagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan.

E. Kajian Pustaka

Tujuan kajian pustaka yang dimaksud dalam Skripsi ini adalah untuk memberikan penjelasan serta gambaran bahwa yang akan dibahas atau diteliti mempunyai relasi baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan pandangan-pandangan yang ada di dalam berbagai literatur yang memberi penjelasan tentang

⁵ *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 25

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Jakarta: Pena, 2007), h. 421

⁷ Anonim, *KUHP* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 102

hal-hal yang ada kaitannya dengan tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana penjara di Pengadilan Negeri Bantaeng dalam kasus pembunuhan.

Adapun literatur buku maupun artikel yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Karya Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*. Buku ini menjelaskan secara panjang lebar tentang hukum pidana secara umum berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam berbagai undang-undangs termasuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 18 tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam KUHP dan ketentuan hukum pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 serta ketentuan hukum pidana islam sebagai bahan perbandingan dalam mengkaji ilmu hukum pidana, namun penjelasan yang termuat di dalamnya lebih terfokus pada kejahatan dan pelanggaran sebagai bentuk penjabaran kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan belum menyentuh pada aspek pelanggaran dan kejahatan yang belum termuat di dalam KUHP.

Karya Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Pidana Islam*. Buku ini membahas secara kritis tentang pandangan hukum pidana Islam (fiqh jinayah) terhadap tindak pidana sebagai bentuk perbandingan hukum pidana umum dan hukum pidana Islam yang didasarkan pada pemahaman dari dalil-dalil hukum yang detail dalam Al-quran dan Hadits.

Artikel Hukum, yang dikutip dari Donald Black, Robohnya Hukum dan Keadilan. Artikel ini menjelaskan secara kritis tentang tinjauan sosiologis penerapan hukum, dimana dalam artikel ini lebih menekankan aspek manfaat

langsung pada masyarakat setelah diterapkannya sanksi pelaku tindak pidana, dan juga dalam artikel ini dijelaskan bahwa sanksi pidana tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita, namun lebih dari sekedar itu bahwa penerapan sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar para narapidana menjadi warga negara yang baik dan berguna.

F. Garis Besar Isi Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang uraiannya meliputi latar belakang dan rumusan masalah, yakni dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara, sanksi pidana pembunuhan dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam penjara, dan efektifitas penerapan pidana penjara di Pengadilan Negeri Bantaeng. Sehingga masalah ini dianggap penting untuk di teliti lebih lanjut. Dengan pokok permasalahan adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana penjara di Pengadilan Negeri Bantaeng dalam kasus pembunuhan.

Bab II Membahas mengenai tinjauan pustaka yang uraiannya meliputi problematika penerapan sanksi pidana penjara yang merupakan hal yang sifatnya penderitaan. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi

pidana penjara tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita, namun lebih dari sekedar itu bahwa penerapan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar para narapidana menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Sistem pidana penjara bervariasi mulai dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.

Bab III membahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan *deskriptik analitik* yaitu melalui pendekatan *sosiologis dan filosofis*, Dalam pengumpulan data digunakan metode *observasi* dan *wawancara* di Pengadilan Negeri Bantaeng.

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian yang pembahasannya meliputi penerapan sanksi pidana penjara dalam tinjauan hukum positif dan hukum islam sebagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan melalui upaya *preventif* dan *represif*.

Bab V adalah penutup akhir penulisan ini memuat kesimpulan dan saran. Bab ini menyimpulkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta masukan berupa saran yang bersifat konstruktif dalam rangka perbaikan kualitas penulisan karya ilmiah berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Problematika Penerapan Sanksi Pidana

Tidak bisa dipungkiri bahwa pidana dan pemidanaan adalah merupakan dua hal yang tak bisa terpisahkan dari hukum. Pidana penjara merupakan suatu hal yang sifatnya penderitaan. Pidana penjara yang dijatuhkan kepada mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi pidana penjara tidak hanya semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita, namun lebih dari sekedar itu bahwa penerapan pidana penjara di lembaga pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan dengan tujuan agar para narapidana menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Sistem pidana penjara bervariasi mulai dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.

Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang bertentangan dengan tujuan pidana penjara, yang antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pidana penjara yang pertama adalah menjamin keamanan para narapidana, dan tujuan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk rehabilitasi.

2. Bahwa fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu kerugian bagi narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupan secara produktif di dalam pergaulan masyarakat.⁸

Pada masa sekarang ini maksud dijatuhkan pidana penjara adalah bahwa dengan pidana itu dapat dilakukan pembinaan sehingga setelah terpidana selesai menjalani pidananya diharapkan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, dalam kenyataannya justru berbanding terbalik (makin lama pidana penjara dijalani, maka semakin memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah dia bebas dari pidana penjara). Hal lain yang menjadi problematika penerapan pidana penjara adalah karena panjang dan lamanya waktu yang digunakan mulai dari tahap penyidikan untuk sampai pada putusan hakim.

Dengan demikian sampai saat ini penerapan pidana penjara tetap ada atau sulit untuk kita hindari, meskipun banyak kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkannya. Penjatuhan pidana tidak hanya sebagai bentuk pembalasan dendam, namun yang terpenting dari penjatuhan pidana adalah merupakan sebagai pemberian bimbingan dan pengayoman. Pemberian bimbingan sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana agar supaya dapat menjadi masyarakat yang baik.

⁸ Suparman Marszuki, *Robohnya Keadilan Politik Hukum dan HAM di Era Reformasi* (Yogyakarta: Pusham UII, 2011), h. 41

Pidana penjara yang dianggap menderitakan menimbulkan suatu alternatif bentuk pidana lain, yaitu berupa pidana denda. Pidana denda ini lebih mengedepankan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana dengan besarnya denda yang harus dibayar oleh terpidana dengan mempertimbangkan minimum maupun maksimum pidana denda yang diancamkan kepada terpidana. Namun kecenderungan seperti ini belum maksimal dilakukan. Disamping itu, sikap hakim terhadap penilaian terhadap ancaman denda cenderung digunakan hanya untuk tindak pidana yang ringan dan pidana penjara. Sekalipun diadakan usaha-usaha pembaruan dan perbaikan untuk mengurangi berlakunya pidana penjara namun suatu kenyataan bahwa pidana penjara akan melekat kerugian-kerugian yang kadangkala sulit untuk dihindari dan diatasi, bilamana ditinjau dari segi tujuan yang hendak dicapai.

a. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan, adalah suatu perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.⁹

b. Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan

1) macam-macam tindak pidana pembunuhan menurut KUHP, yaitu sebagai berikut:

a) Sengaja menghilangkan nyawa orang lain diatur dalam Pasal 338 KUHP.

⁹ Anonim, *KUHP* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 102

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.¹⁰

- b) penganiayaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

“Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.¹¹

Dalam hal ini penganiayaan yang dimaksud adalah dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas sehingga mengakibatkan kematian.

- c) karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 359 KUHP.

“Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.¹²

Matinya orang disini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau kurang perhatian atau lalainya terdakwa.

- 2) macam-macam tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pembunuhan menurut pandangan Hukum Pidana

Islam dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

- a) pembunuhan Secara Sengaja (*Qathlul Amd*)

¹⁰ *Ibid*, h. 102

¹¹ *Ibid*, h. 104

¹² *Ibid*, h. 104

“Pembunuhan secara sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh”.¹³

b) pembunuhan Tidak Sengaja (*Qathlul Khatho'*)

“Pembunuhan secara tidak sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.¹⁴

c) pembunuhan Semi Sengaja (*Qathlul Syibhul Amd*)

“Pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik”.¹⁵

c. Sanksi tindak pidana pembunuhan

1) sanksi tindak pidana pembunuhan menurut KUHP, yaitu pidana

penjara

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹⁶

2) sanksi tindak pidana pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam.

Dalam surah Al.baqarah ayat 178 Allah SWT berfirman:

[illegible]

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24

¹⁴ *Ibid.* h. 24

¹⁵ *Ibid*, h. 24

¹⁶ Anonim *KUHP* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 102

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qhishosh berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, maka hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringana dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁷

Pada ayat yang lain Allah swt. berfirman dalam Al-quran surah Al-baqarah: 179



“dan dalam qhishosh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.¹⁸

Berdasarkan ayat al-qur'an tersebut, maka kita dapat memahami bahwa sanksi bagi pelaku pembunuhan dalam pandangan hukum Islam adalah *Qhishash*, yaitu bahwa pembunuh hukumannya adalah juga dibunuh, kecuali jika mendapatkan maaf dari pihak terbunuh maka pembunuh hanya berkewajiban untuk membayar *diyat*, hal ini menandakan bahwa di dalam hukum *qhishash* terdapat makna yang sangat dalam untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia yang senantiasa menggunakan akalunya.

¹⁷ Dep. Agama RI, *Al-quran dan Tejemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-kautsar, 1985), h.

¹⁸ *Ibid*, h. 44

B. Upaya Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan

Pada hakikatnya, jika kita hendak berbicara tentang upaya-upaya dalam menanggulangi kejahatan khususnya dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan dalam *crime prevention* bahwa dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mencegah *the first crime* (Preventif)

Merupakan suatu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang, dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).¹⁹

2. Metode untuk mengurangi pengulangan kejahatan (*Represif*)

Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

Berdasarkan uraian pandangan tersebut di atas, maka kita dapat memahami bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang meliputi kegiatan-kegiatan *preventif* sebagai upaya untuk meminimalisir serta memperbaiki

¹⁹ Ramli Atmasasmita, dikutip dari (E.H. Sutherland dan ressey: *Crime Prevention* , 1983), (t.d), h. 66

perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (Narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif dan represif*.

a. Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat untuk menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi pengulangan kejahatan.²⁰

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.²¹

Berangkat dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut, yang memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi kita memadai atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana dapat dikembalikan pada keadaan lingkungan sosial yang baik.

²⁰ *Ibid*, h. 66

²¹ Ramli Atmasasmita, yang dikutip dari (Barnest dan Teeters: *Crime Prevention*, 1983), (t.d), h. 79

Dengan kata lain bahwa perbaikan dan pembenahan keadaan ekonomi itu kemudian mutlak dilakukan, namun tentu seharusnya yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah selaku penanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Jadi dalam upaya *preventif* tersebut, memberikan gambaran agar bagaimana kemudian kita melakukan suatu upaya yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan serta kultur masyarakat yang kemudian kita jadikan sebagai suatu budaya dan dinamika dalam pembangunan dan bukan justru sebaliknya seperti halnya berupaya menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Selain itu sebagai warga Negara yang baik, maka para pengak hukum atau pemerintah mempunyai harapan agar kita semua berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

b. Upaya *represif*

Upaya *represif* adalah merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya *represif* dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat,

sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.²²

Dalam membahas sistem *represif*, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita di Indonesia, dimana dalam sistem peradilan pidana terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu: sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan dan kepengacaraan, yang kesemua itu merupakan suatu kesatuan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya *represif* dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis mencoba untuk tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan-kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut *Abdul Syani*, yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- (a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

²² *Ibid*, h. 69

- (b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.²³

Berdasarkan pendapat Abdul Syani tentang perlakuan berdasarkan penerapan hukum tersebut, maka kita dapat memahami bahwa pada hakikatnya yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini merupakan tanggapan atau respon baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya, bahwa perlakuan ini lebih menitik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruan dan kesalahannya, agar dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi, hal ini dimaksudkan agar si pelaku kejahatan di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat secara umum maupun pemerintah.

2) penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), disebabkan mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukannya, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Indonesia saat ini juga sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem pidana penjara yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem

²³ Artikel Hukum tentang penghukuman (*Punishment*) yang dikutip oleh Abdul Syani dalam karya Sahardjo (t.d)

pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) yang berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara saat ini maka, *Sahardjo* juga mengemukakan seperti yang dikutip oleh *Abdul Syani* yang menyatakan bahwa:

“tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut *Sahardjo* yang telah tersesat juga diayomi dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi sesuatu hal yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.”²⁴

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran yang terpatrit dalam diri mereka untuk melakukan perubahan di dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dimana dia tinggal....

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

²⁴ *Ibid*, (t.d)

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Alasan penetapan lokasi penelitian tersebut karena sifat penelitian yang dilakukan adalah normatif atau kepustakaan yang mengkaji dokumen atau putusan Pengadilan dan lokasi penelitian sesuai dengan kemampuan

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu dimana penelitian ini lebih menekankan atau mengkaji keadaan yang terjadi pada masyarakat sehingga menjadi pertimbangan di dalam menegakkan hukum, dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan atau objek yang diteliti dan menganalisis data dari hasil penelitian berdasarkan pendekatan *deskriptif analitik*.²⁵

C. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, untuk mendapatkan suatu data yang sesuai dengan pokok pembahasan, maka pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan *sosiologis*. Secara sosiologis yaitu melakukan analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ Penelitian ini ditentukan oleh tujuan p
atau analisis yang tepat dan akurat yang
Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 20
- 21

2. Pendekatan *filosofis*. Secara filosofis yaitu dengan menganalisis makna-makna secara filosofis terhadap penerapan sanksi tindak pidana kejahatan pembunuhan.

D. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan yang dipadukan dengan penelitian pustaka untuk memperoleh data primer dan data sekunder.

Data *primer* adalah data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian langsung di lapangan. Data primer yang dimaksud di sini yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di Pengadilan Negeri Bantaeng berupa dokumen-dokumen putusan dan data statistik kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Bantaeng.

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, koran, artikel, dan karya ilmiah lainnya, yang berkaitan dengan topik kajian penulis.

1. Jenis data

Dalam penulisan skripsi ini, jenis data yang digunakan yaitu jenis data kualitatif. Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan data tanpa menggunakan prosedur statistik.

2. Sumber data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang digunakan yaitu data lapangan atau *field research* dan data pustaka atau *library research*.

Penelitian lapangan (*field reserach*) yaitu mendokumentasikan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fonemena yang diselidiki.

Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, Koran, dan karya ilmiah lainnya, yang ada relasinya dengan objek penelitian penulis.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera.²⁶ Observasi pada dasarnya adalah pengamatan terhadap sesuatu yang diteliti dengan menggunakan seluruh panca indra.²⁷

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan, bila penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Obyek observasi dalam penelitian kualitatif dinamakan situasi dan kondisi sosial yang terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu: tempat, pelaku dan aktivitas. Jenis observasi yang digunakan oleh dalam penelitian ini yaitu, observasi terstruktur dengan melakukan pengamatan di Pengadilan Negeri Bantaeng secara langsung dan memperhatikan kegiatan para informan dalam hal ini penegak hukum dan tokoh masyarakat serta mengamati

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 12

segala aktifitas dan kegiatan yang dilakukan para penegak hukum baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁸ Wawancara yang dilakukan dalam hal ini adalah wawancara terstruktur yang berarti melakukan kegiatan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang lebih lengkap.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Bantaeng, seperti tulisan yang berupa (peraturan, kebijakan buku register Perkara), serta gambar atau (foto) sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

d. Instrumen pengumpulan data

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran dan pengamatan, maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian dinamakan instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang

²⁸ Esterberg, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 97

diamati. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
- 2) Buku catatan dan alat tulis: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data yang dianggap penting. Kamera; berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan. Dengan adanya foto dan rekaman ini, maka dapat meningkatkan keabsahan akan lebih terjamin.

e. Prosedur pengumpulan data

Dalam penelitian ini, digunakan prosedur penelitian sebagai berikut: Kegiatan penelitian ini dimulai dengan memperoleh izin penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, kemudian surat tersebut diteruskan ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Bagian Balitbangda. Surat izin yang diperoleh dari Kantor Gubernur tersebut, diteruskan ke Pengadilan Negeri Bantaeng pada bagian umum. Kunjungan awal ini sehubungan dengan akan melakukan kegiatan penelitian di Pengadilan Negeri Bantaeng. Kunjungan selanjutnya peneliti diinstruksikan ke bagian pidana.

E. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

- a. *Identifikasi data* yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
- b. *Editing data* adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relasi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil penelitian.

2. Analisis data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode *induktif* dan *deduktif*. Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta khusus, peristiwa kongkrit yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum (*generalisasi*). Sedangkan metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian di sesuaikan dengan faktor-faktor dari yang bersifat khusus. Metode induktif digunakan untuk mengkaji asas-asas atau nilai-nilai yang terkandung dalam penerapan sanksi pidana. Sedangkan deduktif digunakan untuk melihat pandangan hukum dalam menerapkan sanksi pidana penjara di Pengadilan Negeri Bantaeng dalam kasus pembunuh

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Letak Pengadilan Negeri Bantaeng

Pengadilan Negeri Bantaeng terletak di Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Pengadilan Negeri Bantaeng sangat strategis tepatnya berada di perbatasan kota, sehingga memudahkan akses bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng menjangkau Pengadilan tersebut.

Adapun batas-batas letak Pengadilan Negeri Bantaeng, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Penduduk dan Sawah masyarakat Kelurahan Lamalaka.
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan SPBU Lamalaka.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Hotel Alam Jaya Kabupaten Bantaeng.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kejaksaan Negeri Bantaeng.

Letak Pengadilan Negeri Bantaeng juga tidak jauh dari kantor DPRD Bantaeng, Pengadilan Agama Bantaeng, Kantor Bupati Bantaeng dan lain-lain yang terletak di sebelah selatan.

2. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Bantaeng memiliki gedung yang dapat memadai segala keperluan penyelenggaraan sidang perkara pidana dan perkara perdata. Selain itu, tersedianya keperluan kantor bagi tenaga struktural, seperti ruang Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng dan Wakilnya, ruang Ketua Panitera/Panitera Pengganti, ruang Bendahara, dan ruang bagi pegawai Pengadilan lainnya.

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Bantaeng

Pengadilan Negeri Bantaeng sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara pidana dan perkara perdata dalam wilayah hukumnya (Kota Bantaeng). Tugas pokoknya, yakni menerima, memeriksa dan mengadili pelimpahan berkas penuntutan perkara dari Kejaksaan Negeri Bantaeng yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi dalam wilayah hukumnya. Dalam bidang keperdataan, Pengadilan Negeri Bantaeng sangat berperan memeriksa dan menyelesaikan sengketa hak antara penggugat dan tergugat.

4. Daftar Perkara Pidana Pembunuhan yang Masuk di Pengadilan Negeri Bantaeng Dari Tahun 2010-2012

Tabel 4.1: Daftar Perkara Pidana Pembunuhan yang masuk di Pengadilan Negeri Bantaeng dari tahun 2010 – 2012

No	NO. PERKARA	NAMA TERDAKWA	DAKWAAN/ KASUS	STATUS PENAHANAN
1.	120/Pid. B/2010/PN. BTG	Naking bin Daning	-Primair: Pasal 338 KUHP -Subsida: Pasal 351 ayat (3) KUHP -Pasal II ayat (1) UU No. 12/DRT/1951	Tahanan Kota
No	NO. PERKARA	NAMA TERDAKWA	DAKWAAN/ KASUS	STATUS PENAHANAN

2.	122/Pid. B/2010/PN. BTG	Pardi bin Hasidi	-Primair: pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. -Subsida: pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. -Lebih subsidair: pasal 351 ayat (1) Ke-1 KUHP	Tahanan Kota
3.	124/Pid. B/2010/PN. BTG	Salahuddin alias Sala bin Rahmani	-Primair: pasal 340 KUHP -Subsida: pasal 338 KUHP -Lebih subsidair: Pasal 353 ayat (3) KUHP -Lebih subsidair lagi: pasal 351 ayat (3) KUHP	Tahanan Kota
4.	75/Pid. B/2011/PN. BTG	H.Badomming bin Noddin, DKK	Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	Tahanan Kota
5.	177/Pid. B/2011/PN. BTG	Suhafid alias Sapi' bin Tiro	Pasal 338 KUHP	Tahanan Kota
6.	121/Pid. B/2011/PN. BTG	Irfan Mahardi alias Dandi bin H. Darfin	-Primair: pasal 338 KUHP -Subsida: pasal 351 ayat (3) jo pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP	Tahanan Kota
7.	02/Pid. B/2012/PN. BTG	Saharuddin alias Sahar bin Baseng	-Primair: Pasal 338 KUHP -Subsida: pasal 351 KUHP	Tahanan Kota

Keterangan : Dokumentasi Pengadilan Negeri Bantaeng

B. Putusan No. 124/Pid.B/2010/PN.Btg

1. Kasus Posisi

Kasus ini berawal ketika saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu berselisih paham dengan korban Syamsuddin mengenai permintaan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar PBB tahun 2003, setelah menyerahkan uang tersebut saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dipanggil ke rumah korban Syamsuddin untuk menerima bukti pelunasan PBB. Namun setibanya di rumah korban Syamsuddin, saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu diberitahu bahwa SPPT yang semula atas nama Hasnah alias Nanna binti Saddu berubah menjadi atas nama Basri alias Basiri bin Nasir akan tetapi saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu tetap mempertanyakan dimana bukti pelunasan PBBnya tetapi korban Syamsuddin justru menampar saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dan saksi Basir alias Basiri bin Nasir juga ikut menampar saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu.

Bahwa terdakwa mencurigai korban Syamsuddin alias Ust. Sudding telah bekerjasama dengan Basir membalik nama istri terdakwa yaitu Hasnah alias Nanna binti Saddu menjadi Basir alias Basiri bin Nasir, sehingga terdakwa menjadi sakit hati dan dendam kepada korban Syamsuddin.

Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2010 bertempat di Rumah terdakwa Kampung Landang Desa Biang Loe Kecamatan Pa'jukkukang Kabupaten Bantaeng, terdakwa merasa bingung dan pusing memikirkan permasalahan balik nama SPPT tersebut, lalu terdakwa berniat untuk

melampiaskan sakit hatinya kepada korban Syamsuddin, sehingga terdakwa mengambil sebilah parang miliknya kemudian mengasahnya.

Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2010, saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu ke rumah saksi H. Syarifuddin alias H. Sapo bin Bangko untuk menanyakan tentang persetujuan jual beli rumah beserta tanahnya yang telah dipanjarkan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu pulang ke rumah dan member athu terdakwa bahwa H. Syarifuddin alias H. Sapo bin Bangko tidak tahu akan menyerahkan kepada siapa sisa uang pembayaran rumah dan tanah tersebut karena status kepemilikan tanahnya tidak jelas antara saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dan saksi Basri alias Basiri bin Nasir.

Bahwa pada saat itulah terdakwa merasa sakit hati karena tanah yang akan dijual oleh istrinya tidak jadi dibayarkan sisa panjarnya oleh H.Syarifuddin alias H.Sapo bin Bangko, sehingga pada pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat dari trumahnya menuju rumah korban Syamsuddin dengan membawa sebilah parang miliknya dengan cara diikatkan di pinggang sebelah kiri, setelah sampai di depan rumah korban Syamsuddin di Kampung Kadang Kunyi Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, terdakwa mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mendekati korban Syamsuddin yang pada saat itu berada di teras rumahnya pada posisi dibelakangi oleh korban Syamsuddin, terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher korban Syamsuddin, namun korban Syamsuddin mengelak sehingga tidak kena, namun ketika korban Syamsuddin membalikkan badannya ke arah

terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi ke arah leher dan korban Syamsuddin mencoba menangkisnya dengan tangan kiri namun parang mengena leher, kemudian korban Syamsuddin menunduk dan membalikkan badannya, tetapi terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah punggung sebelah kiri korban Syamsuddin, setelah itu korban Syamsuddin langsung terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin alias Ust. Sudding bin Raja meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum no. 61/RSU-IGD/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 pada RSUD yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Dr. H. Sultan, Mars dokter pemeriksa/pembuat ver dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tempat kejadian perkara hari rabu tanggal 11 Agustus 2010 pukul 23.30 Wita, kesimpulan: korban Syamsuddin meninggal akibat trauma tajam pada leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan gagal nafas, serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: lab: 735/KBF/VIII/2010 tanggal 21 September 2010 terhadap barang bukti sebilah parang milik terdakwa, satu lembar celana levis warna biru milik terdakwa, satu lembar baju batik warna coklat milik korban Syamsuddin, satu lembar baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin, dengan kesimpulan hasil laboratorium yakni: parang bergagang bersarung dan celna levis warna biru milik Salahuddin alias Sala bin Rahman serta baju batik warna coklat dan baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin alias Ust Sudding bin Raja, benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu: A.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus tersebut pada putusan Pengadilan Negeri Bantaeng No.124/Pid.B/2010/PN.Btg, terdakwa Salahuddin alias Sala' bin Rahmani telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan 11 Agustus 2010 telah didakwa sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa Salahuddin alias Sala' bin Rahmani, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2010 sekitar 22.30 Wita atau setidaknya pada Agustus tahun 2010, bertempat di Kampung Kadang Kunyi Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban Syamsuddin alias Ust.Sudding, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kasus ini berawal ketika saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu berselisih paham dengan korban Syamsuddin mengenai permintaan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar PBB tahun 2003, setelah menyerahkan uang tersebut saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dipanggil ke rumah korban Syamsuddin untuk menerima bukti pelunasan PBB. Namun setelah di rumah korban Syamsuddin, saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu diberitahu bahwa SPPT yang semula atas nama Hasnah alias Nanna binti Saddu berubah menjadi atas nama Basri alias Basiri bin Nasir akan tetapi saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu tetap mempertanyakan dimana bukti

pelunasan PBBnya tetapi korban Syamsuddin justru menampar saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dan saksi Basir alias Basiri bin Nasir juga ikut menampar saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu.

- b. Bahwa terdakwa mencurigai korban Syamsuddin alias Ust. Sudding telah bekerjasama dengan Basir membalik nama istri terdakwa yaitu Hasnah alias Nanna binti Saddu menjadi Basir alias Basiri bin Nasir, sehingga terdakwa menjadi sakit hati dan dendam kepada korban Syamsuddin.
- c. Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2010 bertempat di Rumah terdakwa Kampung Landang Desa Biang Loe Kecamatan Pa'jukkukang Kabupaten Bantaeng, terdakwa merasa bingung dan pusing memikirkan permasalahan balik nama SPPT tersebut, lalu terdakwa berniat untuk melampiaskan sakit hatinya kepada korban Syamsuddin, sehingga terdakwa mengambil sebilah parang miliknya kemudian mengasahnya.
- d. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2010, saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu ke rumah saksi H. Syarifuddin alias H. Sapo bin Bangko untuk menanyakan tentang persetujuan jual beli rumah beserta tanahnya yang telah dipanjarkan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu pulang ke rumah dan memberitahu terdakwa bahwa H. Syarifuddin alias H. Sapo bin Bangko tidak tahu akan menyerahkan kepada siapa sisa uang pembayaran rumah dan tanah tersebut karena status kepemilikan tanahnya tidak jelas antara saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dan saksi Basri alias Basiri bin Nasir.

- e. Bahwa pada saat itulah terdakwa merasa sakit hati karena tanah yang akan dijual oleh istrinya tidak jadi dibayarkan sisa panjangnya oleh H.Syarifuddin alias H.Sapo bin Bangko, sehingga pada pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat dari trumahnya menuju rumah korban Syamsuddin dengan membawa sebilah parang miliknya dengan cara diikatkan di pinggang sebelah kiri, setelah sampai di depan rumah korban Syamsuddin di Kampung Kadang Kunyi Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, terdakwa mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mendekati korban Syamsuddin yang pada saat itu berada di teras rumahnya pada posisi dibelakangi oleh korban Syamsuddin, terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher korban Syamsuddin, namun korban Syamsuddin mengelak sehingga tidak kena, namun ketika korban Syamsuddin membalikkan badannya ke arah terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi ke arah leher dan korban Syamsuddin mencoba menangkisnya dengan tangan kiri namun parang mengenai leher, kemudian korban Syamsuddin menunduk dan membalikkan badannya, tetapi terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah punggung sebelah kiri korban Syamsuddin, setelah itu korban Syamsuddin langsung terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- f. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin alias Ust. Sudding bin Raja meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum no. 61/RSU-IGD/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 pada RSUD yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Dr. H. Sultan, Mars dokter

pemeriksa/pembuat ver dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tempat kejadian perkara hari rabu tanggal 11 Agustus 2010 pukul 23.30 Wita, kesimpulan: korban Syamsuddin meninggal akibat trauma tajam pada leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan gagal nafas, serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: lab: 735/KBF/VIII/2010 tanggal 21 September 2010 terhadap barang bukti sebilah parang milik terdakwa, satu lembar celana levis warna biru milik terdakwa, satu lembar baju batik warna coklat milik korban Syamsuddin, satu lembar baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin, dengan kesimpulan hasil laboratorium yakni: parang bergagang bersarung dan celna levis warna biru milik Salahuddin alias Sala bin Rahman serta baju batik warna coklat dan baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin alias Ust Sudding bin Raja, benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu: A.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 340 KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa Salahuddin alias Sala' bin Rahmani, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2010, bertempat di Kampung Kadang Kunyi Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja

menghilangkan nyawa orang lain, yaitu korban Syamsuddin alias Ust. Sudding dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- a. Berawal sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah korban Syamsuddin alias Ust. Sudding dengan membawa sebilah parang miliknya dengan cara diikatkan dipinggang sebelah kiri, setelah sampai di depan rumah korban Syamsuddin di Kampung Kadang Kunyi Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Gantarang Keke, terdakwa mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mendekati korban Syamsuddin yang pada saat itu berada di Teras rumahnya, pada posisi sibelakangi oleh korban Syamsuddin, terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher korban Syamsuddin, namun korban Syamsuddin mengelak sehingga tidak kena, namun ketika korban Syamsuddin membalikkan badannya ke arah terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi ke arah leher dan korban Syamsuddin Mencoba Menangkisnya dengan tangan kiri namun parang mengenai leher, kemudian korban Syamsuddin menunduk dan membalikkan badannya, tetapi terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah punggung sebelah kiri korban Syamsuddin namun tidak mengenai tubuh korban Syamsuddin, setelah itu korban Syamsuddin langsung terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut.
- b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin alias Ust. Sudding bin Raja meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum no. 61/RSU-IGD/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 pada RSUD yang dibuat berdasarkan

sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Dr. H. Sultan, Mars dokter pemeriksa/pembuat ver dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tempat kejadian perkara hari rabu tanggal 11 Agustus 2010 pukul 23.30 Wita, kesimpulan: korban Syamsuddin meninggal akibat trauma tajam pada leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan gagal nafas, serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: lab: 735/KBF/VIII/2010 tanggal 21 September 2010 terhadap barang bukti sebilah parang milik terdakwa, satu lembar celana levis warna biru milik terdakwa, satu lembar baju batik warna coklat milik korban Syamsuddin, satu lembar baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin, dengan kesimpulan hasil laboratorium yakni: parang bergagang bersarung dan celna levis warna biru milik Salahuddin alias Sala bin Rahman serta baju batik warna coklat dan baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin alias Ust Sudding bin Raja, benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu: A.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidair

Bahwa ia terdakwa Salahuddin alias Sala' bin Rahmani, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2010 sekitar 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada Agustus tahun 2010, bertempat di Kampung Kadang Kunyi Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bnataeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan yang

dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menjadikan kematian orangnya, yaitu korban Syamsuddin alias Ust.Sudding, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal ketika saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu berselisih paham dengan korban Syamsuddin mengenai permintaan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk membayar PBB tahun 2003, setelah menyerahkan uang tersebut saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dipanggil ke rumah korban Syamsuddin untuk menerima bukti pelunasan PBB. Namun setibanya di rumah korban Syamsuddin, saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu diberitahu bahwa SPPT yang semula atas nama Hasnah alias Nanna binti Saddu berubah menjadi atas nama Basri alias Basiri bin Nasir akan tetapi saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu tetap mempertanyakan dimana bukti pelunasan PBBnya tetapi korban Syamsuddin justru menampar saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dan saksi Basir alias Basiri bin Nasir juga ikut menampar saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu.
- b. Bahwa terdakwa mencurigai korban Syamsuddin alias Ust. Sudding telah bekerjasama dengan Basir membalik nama istri terdakwa yaitu Hasnah alias Nanna binti Saddu menjadi Basir alias Basiri bin Nasir, sehingga terdakwa menjadi sakit hati dan dendam kepada korban Syamsuddin.
- c. Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2010 bertempat di Rumah terdakwa Kampung Landang Desa Biang Loe Kecamatan Pa'jukkukang Kabupaten Bantaeng, terdakwa merasa bingung dan pusing memikirkan permasalahan balik nama SPPT tersebut, lalu terdakwa berniat untuk

melampiaskan sakit hatinya kepada korban Syamsuddin, sehingga terdakwa mengambil sebilah parang miliknya kemudian mengasahnya.

- d. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2010, saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu ke rumah saksi H. Syarifuddin alias H. Sapo bin Bangko untuk menanyakan tentang persetujuan jual beli rumah beserta tanahnya yang telah dipanjarkan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dan saksi Basir alias Basiri bin Nasir.
- e. Bahwa pada saat itulah terdakwa merasa sakit hati karena tanah yang akan dijual oleh istrinya tidak jadi dibayarkan sisa panjarnya oleh H.Syarifuddin alias H.Sapo bin Bangko, sehingga pada pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat dari trumahnya menuju rumah korban Syamsuddin dengan membawa sebilah parang miliknya dengan cara diikatkan di Pinggang sebelah Kiri, setelah sampai di depan rumah korban Syamsuddin di Kampung Kadang Kunyi Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, terdakw amencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mendekati korban Syamsuddin yang pada saat itu berada di Teras rumahnya pada posisi dibelakangi oleh korban Syamsuddin, terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher korban Syamsuddin, namun korban Syamsuddin mengelak sehingga tidak kena, namun ketika korban Syamsuddin membalikkan badannya kea rah terdakwa, teerdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi kea rah leher dan korban Syamsuddin Mencoba Menangkisnya dengan tangan kiri namun parang mengena leher, kemudian

korban Syamsuddin menunduk dan membalikkan badannya, tetapi terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah punggung sebelah kiri korban Syamsuddin namun tidak mengena tubuh korban Syamsuddin, setelah itu korban Syamsuddin langsung terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- f. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin alias Ust. Sudding bin Raja meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum no. 61/RSU-IGD/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 pada RSUD yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Dr. H. Sultan, Mars dokter pemeriksa/pembuat ver dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tempat kejadian perkara hari rabu tanggal 11 Agustus 2010 pukul 23.30 Wita, kesimpulan: korban Syamsuddin meninggal akibat trauma tajam pada leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan gagal nafas, serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: lab: 735/KBF/VIII/2010 tanggal 21 September 2010 terhadap barang bukti sebilah parang milik terdakwa, satu lembar celana levis warna biru milik terdakwa, satu lembar baju batik warna coklat milik korban Syamsuddin, satu lembar baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin, dengan kesimpulan hasil laboratorium yakni: parang bergagang bersarung dan celna levis warna biru milik Salahuddin alias Sala bin Rahman serta baju batik warna coklat dan baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin alias Ust Sudding bin Raja, benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu: A.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP.

Lebih Subsidair Lagi

Bahwa ia terdakwa Salahuddin alias Sala' bin Rahmani, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2010 sekitar 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada Agustus tahun 2010, bertempat di Kampung Kadang Kunyi Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya tidaknya di suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan menjadikan mati orangnya, yaitu korban Syamsuddin alias Ust. Sudding, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berawal sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah korban Syamsuddin alias Ust. Sudding dengan membawa sebilah parang miliknya dengan cara diikatkan di pinggang sebelah kiri, setelah sampai di depan rumah korban Syamsuddin di Kampung Kadang Kunyi Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Gantarang Keke, terdakwa mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mendekati korban Syamsuddin yang pada saat itu berada di Teras rumahnya, pada posisi membelakangi oleh korban Syamsuddin, terdakwa mengayunkan parangnya ke arah leher korban Syamsuddin, namun korban Syamsuddin mengelak sehingga tidak kena, namun ketika korban Syamsuddin membalikkan badannya ke arah terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi ke arah leher dan korban Syamsuddin Mencoba

Menangkisnya dengan tangan kiri namun parang mengena leher, kemudian korban Syamsuddin menunduk dan membalikkan badannya, tetapi terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah punggung sebelah kiri korban Syamsuddin namun tidak mengena tubuh korban Syamsuddin, setelah itu korban Syamsuddin langsung terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa meninggalkan tempat tersebut.

- b. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Syamsuddin alias Ust. Sudding bin Raja meninggal dunia, sesuai dengan hasil Visum et Repertum no. 61/RSU-IGD/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 pada RSUD yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh Dr. H. Sultan, Mars dokter pemeriksa/pembuat ver dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tempat kejadian perkara hari rabu tanggal 11 Agustus 2010 pukul 23.30 Wita, kesimpulan: korban Syamsuddin meninggal akibat trauma tajam pada leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan gagal nafas, serta pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor: lab: 735/KBF/VIII/2010 tanggal 21 September 2010 terhadap barang bukti sebilah parang milik terdakwa, satu lembar celana levis warna biru milik terdakwa, satu lembar baju batik warna coklat milik korban Syamsuddin, satu lembar baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin, dengan kesimpulan hasil laboratorium yakni: parang bergagang bersarung dan celna levis warna biru milik Salahuddin alias Sala bin Rahman serta baju batik warna coklat dan baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin alias Ust Sudding bin Raja, benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu: A.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Adapun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Salahuddin alias Sala' bin Rahmani terbukti bersalah melakukan “tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Salahuddin alias Sala' bin Rahmanidengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- c. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang berhulu dan bersarung
 - 2) 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru
 - 3) 1 (satu) lembar baju batik
 - 4) 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu:

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur – unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu
- c. Menghilangkan nyawa orang lain

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Salahuddin alias Sala' Bin Rahmani dan setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan serta selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. dengan sengaa dan dengan direncanakan terlebihb dahulu.

Menimbang, bahwa kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau defenisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan *Criminal Law* disebutkan sengaja itu suatu istilah yang diketahui

lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat “*intention is terms of foresight of consequences coupled with a desire for them*” dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya.

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya sehingga dalam prakteknya unsur “dengan sengaja” tidaklah dapat dipertimbangkan secara tersendiri melainkan harus dipertimbangkan bersama unsur perbuatannya (dengan sengaja untuk berbuat apa ?)

Menimbang bahwa untuk dapat diterima mengenai adanya “perencanaan terlebih dahulu” atau “*voobedachte raad*” diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Sipelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya untuk memikirkan kembali rencananya.

Menimbang bahwa kejahatan dalam pasal ini (Pasal 340 KUHP) dinamakan “pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu” (*moord*), boleh dikatakan ini

adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*), akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. “direncanakan lebih dahulu” (*voorbedachte raad*) artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. (R.Soesilo ; Kitab Undang – undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal ; Politeia-Bogor, cetakan ulang tahun 1990, h.241).

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka sesungguhnya yang menjadi unsur sentral yang merupakan delik pokok/utama dalam pasal ini (Pasal 340 KUHP) adalah adanya perbuatan “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dan unsur pemberatannya adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan “direncanakan terlebih dahulu”.

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan adanya kesengajaan dan suatu perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, berkaitan dengan perkara *aquo*, maka harus dapat diungkap beberapa hal dari perbuatan pelaku ataupun keadaan –keadaan yang merupakan suatu niat/sikap bathin serta perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain antara lain :

- a. Apa motivasinya pelaku ?
- b. Siapa sasarannya ?
- c. Kapan akan dilakukan ?
- d. Di mana akan dilakukan ?
- e. Bagaimana melakukannya ?

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu” tidaklah dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan harus dipertimbangkan bersama – sama dengan unsur “menghilangkan nyawa orang lain”, oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 3 unsur menghilangkan nyawa orang lain:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam pasal ini adalah apabila hilangnya nyawa seseorang/matinya seseorang merupakan maksud dan tujuan dari perbuatan pelaku, sehingga untuk terpenuhi unsur ini harus dapat dibuktikan adanya kesengajaan/ kehendak dari pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur Ad. 2 diatas maka unsur “maka unsur menghilangkan nyawa orang lain” ini akan dipertimbangkan bersama sama dengan unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada pokoknya terungkap:

- a. Bahwa pada tahun 2003 saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu pernah berselisih paham dengan korban Syamsuddin mengenai adanya perubahan nama dalam SPPT yang semula atas nama saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu berubah menjadi atas nama Basri alias Basiri bin Nasir dan pada saat

saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu mempertanyakan dimana bukti pelunasan PBBnya, korban Syamsuddin justru menampar saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dan saksi Basri alias Basiri bin Nasir juga ikut menampar saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu.

- b. Bahwa kemudian pada tahun 2010 terjadi jual beli rumah diatas tana yang terletak di kampung kadang kunyi atas saksi Hasna alias Nanna binti Saddu dengan saksi H.Syaripuddin alias H.Sapo Bin Bangko dengan kesepakatan harga Rp.25.000.000,- (dua pulu lima juta rupiah).
- c. Bahwa diatas kesepakatan tersebut ,H.Syaripuddin alas H.sapo Bin Bangko telah membayar panjar sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2010 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Hasna Alias Nanna Binti Saddu hendak menagih sisa pembayaran tersebut namun saksi H.Syaripuddin Alias H.sapo bin Bangko tidak mau membayarnya dengan alasan SPPT atas tanah yang diatasnya dengan rumah tersebut adalah atas nama Basri Alias Basiri Bin Nasir dan bukanlah atas nama saksi Hasna Alias Nanna binti Saddu.
- e. Bahwa saksi Hasna Alias Nanna Binti Saddu pulang ke rumah dan memberitahu tedakwa bahwa H.Syaripuddin Alias H.Sapo Bin Bangko tidak tahu akan menyerahkan kepada siapa sisa uang pembayaran rumah tersebut dan tanah tersebut karena kepemilikan tanahnya tidak jelas antara saksi Hasnah alias Nanna binti Saddu dan saksi Basri alias Basiri bin Nasir.

- f. Bahwa pada pukul 19.00 Wita terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah parang miliknya dengan cara diikatkan di pinggang, sebelah kiri, setelah sampai di depan rumah korban Syamsuddin Alias Ustadz Sudding Bin Raja di kampung kadang kunyi Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng, terdakwa melihat korban Syamsuddin di teras rumahnya lalu terdakwa mencabut parang dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa mendekati korban Syamsuddin, terdakwa langsung mengayunkan parangnya ke arah leher korban Syamsuddin, namun korban Syamsuddin mengelak sehingga tidak kena, namun ketika korban Syamsuddin membalikkan tanganya ke arah terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parangnya lagi ke arah leher, korban Syamsuddin mencoba menangkisnya dengan tangan kiri namun parang mengenai leher, kemudian korban Syamsuddin menunduk dan membalikkan badannya , tetapi terdakwa kembali mengayunkan parangya ke arah punggung sebelah kiri korban Syamsuddin namun tidak mengenai tubuh korban Syamsuddin, setelah itu korban Syamsuddin langsung terjatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut.
- g. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Syamsuddin Alias Ustadz Sudding bin Raja meninggal dunia, sesuai dengan hasil visumet Repertum no.61/RSU-IGD/VIII/2010 tanggal 20 Agustus 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H.Sultan Mars dokter pemeriksa /pembuat visum et Repertum dengan hasil pemeriksaan korban Syamsuddin meninggal akibat trauma tajam pada leher sehingga mengakibatkan pendarahan hebat dan gagal nafas.

- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik nomor: Lab. : 735/KBF/VIII/2010 terhadap barang bukti sebilah parang milik terdakwa, satu lembar celana levis warna biru milik terdakwa, satu lembar baju batik warna coklat milik korban Syamsuddin, diperoleh fakta bahwa pada parang bergagang dan besarung serta celana levis warna biru milik Salahuddin alias Sala' bin Rahmani serta baju batik warna coklat dan baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin alias Ustadz Sudding bin Raja , benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitiu : A.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat telah diperoleh suatu keadaan-keadaan serta rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa memiliki dendam dan merasa sakit hati terhadap korban Syamsuddin alias Ustadz Sudding bin Raja karena terdakwa mencurigai korban Syamsuddin alias Ustadz Sudding telah bekerjasama dengan Basir membalik nama Surat Pemberitahuan Pajak Tanah (SPPT) yang semula atas nama istri terdakwa yaitu Hasna Alias Nanna Binti Saddu menjadi Basri alias Basiri Bin Nasir dan juga korban pernah menampar istri terdakwa, sehingga hal tersebut menurut majelis merupakan suatu motivasi bagi terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan.
- b. Bahwa selanjutnya akibat perbuatan korban Syamsuddin alias Ustadz Sudding bin Raja tersebut akhirnya tanah yang akan dijual oleh istri terdakwa tidak mau dibayarkan sisa panjarnya oleh H.Syaripuddin alias H. Sapo bin Bangko

pada saat Hasnah menagihnya pada tanggal 11 Agustus 2010 sekitar 14.00 Wita, lalu setelah mengetahui berita tersebut terdakwa pergi ke rumahnya pada pukul 19.00 Wita dengan membawa sebilah parang.

- c. Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah korban sekitar 2 (dua) Km dan terdakwa pergi dengan berjalan kaki.
- d. Bahwa terdapat suatu rentang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir apa yang akan diperbuatnya yaitu sejak terdakwa mengetahui berita tidak dibayarkannya sisa uang oleh H.Syaripuddin atas H. Sapo bin Bangko hingga terdakwa pergi dari rumah dengan membawa parang yaitu sekitar pukul 19.00 Wita, serta telah terdapat waktu yang cukup pula untuk memikirkan kembali apa yang akan diperbuatnya yaitu pada saat terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah korban sejauh kurang lebih 2 Km.
- e. Bahwa perbuatan terdakwa yang pergi malam-malam dengan membawa parang menunjukkan telah ada niat itikad dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan, hal mana dapat dipandang sebagai suatu rencana.
- f. Bahwa setelah terdakwa melihat korban Syamsuddin alias Ustadz Sudding bin Raja di depan rumahnya, tanpa ada pembicaraan apapun terdakwa langsung mencabut parangnya lalu mengayunkannya ke arah korban beberapa kali yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia akibat pendarahan yang hebat dan gagal nafas dengan luka pada leher, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah mengetahui apa yang akan dilakukan dan siapa sasarannya.
- g. Bahwa terdakwa merasa puas atas parbuatannya dan terdakwa tidak menyesal.

Bahwa parang bergagang dan bersarung serta celana levis warna biru milik terdakwa serta baju batik warna coklat dan baju singlet warna putih milik korban Syamsuddin alias Ustadz Sudding Bin Raja, benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu: A .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum serta pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan terdakwa untuk mendatangi korban Syamsuddin alias Ustadz Sudding Bin Raja kemudian menebaskan parangnya beberapa kali sehingga akhirnya mengenai leher korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia dan telah dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dengan motivasi yaitu dendam pada korban Syamsuddin alias Ustadz Syamsuddin bin Raja oleh karena korbanlah yang menjadi akar permasalahan tidak dibayarkannya sisa uang penjualan rumah dan tanah oleh H.Sapo karena adanya perubahan SPPT atas nama Hasnah istri terdakwa menjadi atas nama Basri serta terdakwa merasa sakit hati (siri) karena korban pernah memukul istri terdakwa sehingga alasan-alasan dalam pembelaan (pledooi) yang diajukan penasehat hukum terdakwa harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur-unsur dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain".

Menimbang bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan terhadap terdakwa maka untuk memenuhi rasa keadilan, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini terdakwa ditahan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka majelis hakim menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang berhulu dan bersarung.
- b. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.
- c. 1 (satu) lembar baju batik.
- d. 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih.

Maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri dari terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang Memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.
- c. Korban adalah seorang ustadz yang menjadi tokoh masyarakat di kampung tersebut.

Hal-hal yang Meringankan

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 340 KUHP, undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara pidana nomor 124/Pid.B/2010/PN.BTG adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Salahuddin alias Sala' bin Rahmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) bilah senjata tajam berupa parang berhulu dan bersarung.

2. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan:

1. 1 (satu) lembar baju batik.
2. 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna putih.

Masing-masing agar dikembalikan pada keluarga korban

- f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

C. Analisis Hukum

Dalam perkara *in casu*, terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan model dakwaan kumulatif atau model dakwaan yang menggabungkan dakwaan bertingkat (primair dan subsidair) dengan dakwaan alternatif. Sehingga atas dasar tersebut, majelis hakim tinggal membuktikan dakwaan primair pada dakwaan pertama, apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka unsur-unsur pada dakwaan selanjutnya (subisidair dan alternatif) tidak perlu dibuktikan lagi. Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana berupa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pada dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP, sehingga terdakwa mutlak dijatuhi sanksi pidana.

Putusan majelis hakim yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara selama 18 tahun kepada terdakwa Salahuddin bin Rahmani dalam perkara *in casu* pada dasarnya sudah tepat, baik ditinjau dari segi formal, yakni secara umum sudah memenuhi ketentuan dalam KUHP. Maupun dari segi materil, yakni ketepatan dalam mengurai keterkaitan antara pasal-pasal yang

didakwakan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Putusan majelis hakim berupa pidana penjara selama 18 tahun kepada terdakwa kasus pembunuhan berencana dalam perkara *in casu* dalam hemat saya sudah memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan bahwa sanksi pidana penjara selama 18 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah secara formalitas perundang-undangan sudah seimbang dengan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa manusia. Meski demikian, ada beberapa aspek yang perlu dianalisis dan dikritisi, sebagai berikut :

- Pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan berupa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pada dakwaan primair yakni melanggar Pasal 340 KUHP, didasarkan pada keterangan terdakwa pribadi, keterangan saksi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum. Meski demikian, dalam perkara *in casu* majelis hakim kurang mempertimbangkan faktor emosional dan psikologikal pelaku yang mendasarinya melakukan tindakan pembunuhan berencana. Pertimbangan tentang keadaan psikologi pelaku atau terdakwa merupakan hal yang sangat mutlak untuk dipertimbangkan. Hal ini dapat dijadikan dasar pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam perkara *in casu* pertimbangan tentang sehatnya terdakwa secara rohani (psikologi atau kejiwaan) hanya didasarkan pada hasil pengamatan di depan persidangan semata, tanpa dikuatkan dengan keterangan tertulis dari Rumah Sakit. Keterangan tertulis dari pihak Rumah Sakit tentang hasil pemeriksaan

kondisi kejiwaan atau psikologi pelaku mutlak dilakukan mengingat perbuatan pelaku sangat sadis dan seakan di luar ambang batas akal sehat dan naluri kemanusiaan. Keterkaitan erat antara kondisi kejiwaan pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya inilah seharusnya juga menjadi pertimbangan utama majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

- Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim seharusnya mengacu pada sistem pembuktian sebagaimana yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) atau sistem pembuktian yang berdasarkan pada minimal dua alat bukti (asas minimum pembuktian menurut Pasal 183 KUHP) ditambah dengan keyakinan hakim. Pada pembuktian unsur “dengan rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHP, seharusnya juga dikuatkan dengan keterangan dari pihak Rumah Sakit tentang kondisi kejiwaan pelaku. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan kesan bahwa majelis hakim kurang proaktif dalam membuktikan unsur pasal yang didakwakan dan hanya sekedar meng-iya-kan alur atau uraian dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan yang berdasarkan kesalahan pelaku/terdakwa hanya pada keyakinan hakim dan tidak didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah hanya berlaku dalam sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*convectoin rasionce* atau *convection intim*) pada saat masih berlakunya asas *deccasatoir* di Eropa dan sekarang sudah lama ditinggalkan. Jika para

hakim-hakim kita masih merujuk pada sistem pembuktian tersebut, maka hal ini akan menggambarkan betapa usangnya pengetahuan hukum (*law ekspayered knowledge*) yang dimiliki oleh hakim-hakim kita.

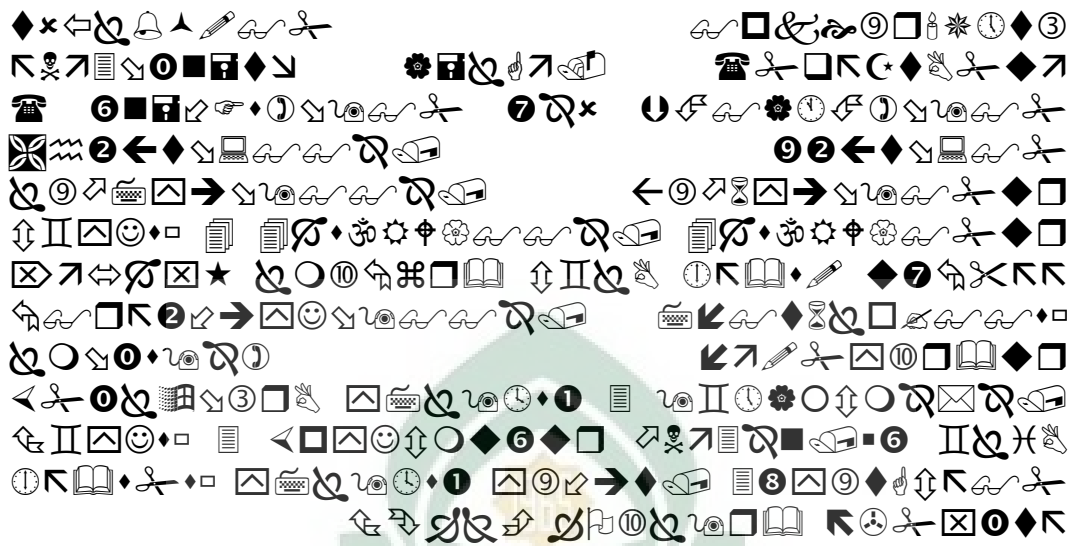
D. Penerapan Sanksi Pidana atau Uqubah terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Dalam konsep hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) sanksi pidana atau *uqubah* yang dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* pembunuhan disesuaikan dengan jenis pembunuhan yang dilakukannya. Secara lebih lengkap, jenis sanksi/*uqubah* tersebut diuraikan sebagai berikut :²⁹

1. Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan sengaja

Ada dua macam hukuman atau sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja, yaitu: 1) hukum pokok adalah *qishash*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korban, dan hukuman *diat* yaitu pembunuh harus membayar kompensasi/denda kepada pihak keluarga korban senilai 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing; dan 2) hukuman pengganti berupa *ta'zir*, yaitu hakim diberikan kebebasan untuk memilih hukuman yang lebih maslahat. Disamping itu kepada pihak keluarga keluarga korban uantuk menentukan hukuman yang cocok terhadap pelaku atau memaafkan pelaku apakah dengan syarat atau tanpa syarat. Dalam konteks pemberian maaf ini, Allah menjelaskan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 178

²⁹ Ahmad Wardi Muelich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 138 –



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.³⁰

Ditekankan bahwa pembunuh harus menyadari dan menginsafi bahwa pemberian maaf dari pihak keluarga adalah suatu keringanan dari Allah dan suatu rahmat. Dan kepada pihak keluarga korban dimintakan agar jangan melampaui batas hukuman yang telah ditentukan.

2. Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan semi sengaja

Hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan menyurapai sengaja terdiri dari dua macam, yaitu: 1) hukuman pokok yang terdiri dari hukuman *diat*, yaitu pembunuh memberikan

³⁰ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Riels Grafika, 2009), h.

kompensasi/denda kepada pihak keluarga korban senilai dengan 100 unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing, jika sanksi *diat* oleh pelaku pembunuhan merasa tidak mampu, maka dikenakan sanksi hukuman *kafarat*, yaitu dapat memerdekakan hamba yang mukmin dan jika pelaku pembunuhan merasa tidak mendapatkan hamba, maka hukuman diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut; dan 2) hukuman pengganti, pelaku pembunuhan berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti atas tidak didapatkan budak yang mukmin, juga hukum pengganti berupa ta'zir yaitu hukuman yang diberikan kewenangan kepada hakim untuk memilih hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku. Dan bagi pihak keluarga korban diberikan kesempatan oleh hakim hak untuk bersikap dalam memilih hukuman atau memaafkan pelaku pembunuhan.

3. Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan tidak sengaja

Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja sama dengan hukuman pembunuhan menyurpai sengaja, yaitu hukuman *diat*, yaitu pembunuh memberikan kompensasi/denda kepada pihak keluarga korban senilai dengan 100 unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing, jika hukuman *diat* oleh pelaku pembunuhan merasa tidak mampu, maka dikenakan hukuman *kafarat* yaitu dapat memerdekakan budak yang mukmin, jika tidak mendapatkan budak maka hukuman diganti dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Pembunuhan tidak sengaja selain dikenakan hukuman *diat* dan *kafarat*, juga dikenakan hukuman pengganti yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut, atau hakim menjatuhkan hukuman

ta'zir berdasarkan kemaslahatan, tetapi unsur pemaaf dari keluarga korban juga dapat menentukan apakah korban dihukum atau dibebaskan.

Dalam perkara *in casu* (perkara dengan Nomor: 124/Pid.B/2009/PN.Btg) dimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan adalah tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang juga dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja, maka sanksi pidana yang pantas dikenakan kepada pelaku menurut hukum pidana Islam adalah mengacu pada jenis sanksi pidana pembunuhan sengaja, yaitu hukuman pokok berupa *qishash* dan hukuman *diat* atau hukuman pengganti berupa hukuman *ta'zir*.

Penerapan sanksi pidana pembunuhan berencana yang disamakan dengan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah dikarenakan dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) tidak diatur secara spesifik tentang pengelompokan pembunuhan berencana. Selain itu, pembunuhan berencana dalam hukum pidana Islam dikategorikan juga sebagai bagian dari pembunuhan sengaja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara dalam Kasus Pembunuhan di Pengadilan Negeri Bantaeng yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara selama 18 tahun kepada pelaku/terdakwa pembunuhan berencana dalam perkara Nomor: 124/Pid.B/2009/PN.Btg., dalam hemat saya sudah memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh JPU. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu dikritisi, di antaranya yaitu pertimbangan majelis hakim tentang keadaan psikologis terdakwa tidak didasarkan atau dikuatkan dengan bukti keterangan tertulis dari pihak Rumah Sakit, melainkan berdasarkan hasil pengamatan semata.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum pidana Islam disesuaikan dengan jenis *jarimah* pembunuhan yang dilakukan pelaku. Khusus sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam hukum pidana Islam disamakan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja, yaitu dapat berupa sanksi *qishas* dan *diat* atau *ta'zir*.

B. Saran

64

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka memberikan keadilan yang sepenuhnya pada setiap putusan kasus pembunuhan berencana, baik kepada pelaku maupun kepada keluarga korban, maka kedepannya majelis hakim harus memberikan pertimbangan yang lebih utuh. Pertimbangan tersebut baik terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setiap alat-alat bukti yang diajukan, maupun terhadap kondisi psikologi pelaku yang mendasarinya melakukan tindak pidana pembunuhan. Pertimbangan tersebut juga seharusnya dikuatkan dengan keterangan tertulis lain. Selain itu, disarankan agar hakim terus memperluas wawasan hukumnya agar dalam memberikan satu pertimbangan hukum hakim dapat mengedapankan nilai keadilan substansial.
2. Melihat bahwa hukum pidana Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan memberikan rasa keadilan yang seimbang dengan menempatkan keluarga korban sebagai unsur penentu dalam menjatuhkan sanksi hukuman pidana mati terhadap pelaku pidana pembunuhan. Serta penjatuhan sanksi mati atau dibebaskan dari hukuman mati didasarkan pada itikad baik keluarga korban. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan penerapan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia, dengan tidak mengabaikan Hak Asasi Manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1985.

Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

- Al-Imam Aby Al-Husaini ibnu Al-Hajjaji Al-Qusyairi An-Naisyaburi. *Shahih Muslim Juz 3*. Arabiyah: Darul Kutubi As-sunnah. 136 M.
- E.H.Sutherland dan Cressey, Ramli Atmasasmita: *Crime Prevention*.1983.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cet. XV Rosda Karya. 2001.
- P.A.F. Lamintang, , *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. 1997.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Cet. III Rineka Cipta. 2001.
- Syarifin Pipin., *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2008
- Tim Prima Pena., *kamus Ilmiah Populer.*, Surabaya: Gitamedia Press. 2006
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* . Semarang : Aneka Ilmu. 1977
- Gassing, Qadir dan Wahyuddin Halim. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makassar: Alauddin Press. 2009.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Marpaung, Leden. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XV; Bandung: Rosda Karya. 2001.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Sistem Peradilan Pidana “Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia.”* Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islamiy*. Juz. II; t.tp: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th. Dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Bemmelen, van. *Strafvordering Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht*. Groningen: W.E.J. Tjeenk Willink, 1955. Dikutip dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. III; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2000.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Gassing, Qadir dan Wahyuddin Halim, ed.. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Cet. II; Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Kamus Hukum*. Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, t.th.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Delik-deliK Khusus Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suharsil. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Cet. II; Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marpaung, Leden. *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XV; Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. edisi revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: PT Citra Bakti, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Interpretasi Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Peradilan Pidana*; dikutip dalam *Dictum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan*. Jakarta: LeIP, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. "Arti Penting Hermeneutik dalam Penerapan Hukum." Pidato pengukuhan Guru Besar, Surabaya: Universitas Airlangga, 17 Desember 2005. Dikutip dalam Tjandra Sridjaja Pradjonggo. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Cet. II; Jakarta: Indonesia Lawyer Club, 2010.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Republik Indonesia. *KUHAP: Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan*. Surabaya: Karya Anda, t.th.

- Sabiq, Sayid. *Fiqh as-Sunnah*. Juz. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1980. Dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Samin, Sabri. *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia: Eklektisisme dan Pandangan Non Muslim*. Jakarta: Kholam Publishing, 2008.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Data Media, 1994.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Besrta Penjelasannya Lengkap Pasal demi Pasal*. Cet. IX; Bogor: Politea, 1995.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989. Dikutip dalam Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. t.tp: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- Prasetyo, Eko. *Keadilan Tidak untuk yang Miskin*. Yogyakarta: Resist Book. 2010
- Puspa, Yan Pramadya. *Kamus Hukum (Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia dan Inggris*. Jakarta : Aneka Ilmu. 1977.
- Samosir, C. Djisman. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Auliah. 2010.
- Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: Rineka Cipta. 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pasal 1 butir 14 jo. butir 15. Surabaya: Karya Anda, t.th.

Artikel

Artikel Hukum tentang penghukuman (*Punishment*) yang dikutip oleh *Abdul Syani* dalam karya *Sahardjo*.

Artikel Hukum, yang dikutip dari *Donald Black.*, *Runtuhnya Hukum Keadilan dan HAM*.



BIODATAKU



Nama : Ahmad Nasrun

Nim : 10300108008

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng, 23 April 1989

Alamat : Bantaeng

Kelurahan : Tanah Loe

Kecamatan : Gantarang Keke

Kabupaten/Kota : Bantaeng

Provinsi : Sulawesi Selatan

I.P.K : 3,55

Nomor HP. : 0813 55 809767

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara
di Pengadilan Negeri Bantaeng dalam Kasus Pembunuhan

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmad Nasrun Kaimuddin (ANK), lahir di Desa kecil yang terletak di Kab. Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 23 April 1989. Penulis merupakan buah hati yang dilahirkan dari pasangan suami dan istri (Kaimuddin dan Zahriyah), dan merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara yang terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 1 (satu) laki-laki. Penulis pertama kali menginjakkan kakinya di dunia pendidikan formal pada tahun 1996 di SD Negeri No. 46 Kadang Kunyi Bantaeng dan tamat pada tahun 2002.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-Furqon Pusat Ereng-Ereng Kab. Bantaeng selama 6 tahun (MTs dan MAS) dan tamat/lulus pada tahun 2008. Kemudian pada tahun itu juga, penulis melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan melalui jalur UML Program Strata Satu (S1).

Keinginan terbesar dalam hidupnya adalah membahagiakan orang tua dengan melakukan yang terbaik hingga akhir hayatnya dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara pada umumnya serta ingin menjadi bagian dari pelopor perubahan dalam mewujudkan peradaban di Indonesia Timur pada Khususnya . *“Hidup adalah Pilihan”*, adalah salah satu prinsip dalam hidupnya yang dijadikannya sebagai inspirator dan motivator dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan misteri yang tak berkesudahan.

“Jika anda ingin mengetahui gambaran masa depan anda, maka lihat dan perhatikanlah pilihan-pilihan hidupmu hari ini”.

(Accunk Putra Bantaeng)